



KETIMPANGAN EKONOMI INDONESIA DI TAHUN POLITIK 2014

Ari Mulianta Ginting*)

Abstrak

Perkembangan indikator makro ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil yang mengembirakan. Pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dan berada rata-rata 5,85 persen dalam kurun waktu 2008-2013. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada saat yang bersamaan terjadi ketimpangan. Data Indeks Gini Indonesia dari tahun 2004 hingga tahun 2013 menunjukkan tren yang meningkat dan bahkan pada tahun 2013 menunjukkan angka 0,413. Indeks Gini tahun 2013 ini merupakan indeks terbesar sepanjang sejarah Indonesia dari tahun 1964 hingga sekarang tahun 2013. Hal ini menunjukkan secara jelas bahwa terjadi ketimpangan dalam masyarakat atau dengan kata lain jurang antara masyarakat kaya dan miskin semakin melebar. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah perlu mendorong kesetaraan dan keadilan dalam mengeluarkan kebijakan. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan anggaran dalam APBN yang dapat mengatasi ketimpangan ekonomi Indonesia. Apalagi momentum tahun politik 2014 dapat dijadikan sebagai suatu titik balik bagi pemerintah dan calon legislatif yang baru untuk dapat mengeluarkan kebijakan baru yang lebih berorientasi pada penciptaan kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Pendahuluan

Ketimpangan ekonomi Indonesia meningkat tajam dalam satu dekade terakhir dan mencapai rekor tertinggi dengan perubahan koefisien Gini hampir 20 persen dalam periode 1990 sampai dengan 1999 dan 2000 sampai dengan 2012. Pendapat tersebut disampaikan oleh Deputi Rektor Universitas Paramadina Wijaya Samirin dalam orasi ilmiah pada dies natalies ke-16 Universitas Paramadina Jakarta. Prestasi ekonomi tidak menggambarkan dengan jelas siapa yang sesungguhnya menikmati

pertumbuhan ekonomi karena justru rata-rata koefisien Gini menunjukkan angka peningkatan pesat bahkan lebih tinggi dari negara di kawasan lain dan Anggota BRIC (Brasil, Rusia, India dan Cina).

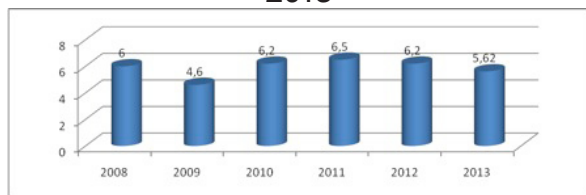
Dalam enam tahun terakhir (2008-2013), perekonomian nasional mampu tumbuh dengan cukup kuat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,85 persen. Pada tahun 2008 ekonomi Indonesia tumbuh 6,0 persen dengan dorongan dari permintaan domestik yang cukup tinggi. Namun pada tahun 2009,

*) Peneliti Muda Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: ari.ginting@dpr.go.id



perekonomian nasional mengalami perlambatan yang cukup signifikan akibat dampak krisis global yang mempengaruhi sisi eksternal, dengan kontraksi ekspor-impor karena menurunnya pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia sehingga hanya tumbuh 4,6 persen. Akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh meningkat dan stabil, bahkan pertumbuhan ekonomi berada di atas 6,0 persen untuk tahun 2010 hingga tahun 2012, dan sempat mengalami penurunan sedikit pada tahun 2013. (lihat Grafik 1).

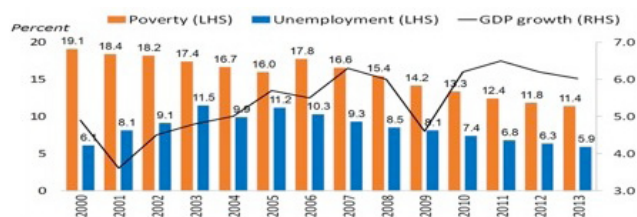
Grafik 1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2008-2013



Sumber: Badan Pusat Statistik (2014)

Pertumbuhan ekonomi terjadi peningkatan dari tahun ke tahun tetapi pada saat yang bersamaan terjadi ketimpangan di Indonesia. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan naik 480.000 dari 28,07 juta jiwa pada Maret 2013 menjadi 28,55 juta pada September 2013. Persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk pun naik dari 11,37 (Maret) menjadi 11,47 persen (September). Apalagi penyebab kenaikan itu kalau bukan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada akhir Juni 2013. Sejak tahun 2006 jumlah persentase penduduk miskin mengalami penurunan secara konsisten, walaupun kecepatan penurunannya melambat, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Penurunan jumlah orang miskin sejalan dengan tambahan penciptaan lapangan kerja sehingga menurunkan tingkat pengangguran (lihat Grafik 2).

Grafik 2
Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : BPS (2014)

Namun, ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, memaparkan hal yang cukup mengganggu

dengan Grafik 2 di atas. Pada kurun waktu 2001 hingga 2005, tingkat pengangguran naik justru ketika pertumbuhan ekonomi meningkat. Sebaliknya, pada periode 2007-2009 dan 2011-2013, tingkat pengangguran justru terus menurun padahal pertumbuhan ekonomi melambat. Bahkan, pada tahun 2009 ketika krisis keuangan global membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup merosot tajam, tingkat pengangguran tetap turun. Hal ini bisa terjadi karena banyak pekerja di Indonesia terlalu miskin untuk menganggur (too poor to be unemployed). Jika terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hari ini, besok harinya harus mendapatkan pekerjaan baru, apa pun pekerjaan itu, entah memulung, mengojek, mengobjek, menjadi joki 3 in 1, dan sebagainya. Jadi, rendahnya tingkat pengangguran tidak mencerminkan kualitas kerja, tingkat kesejahteraan, atau kualitas pertumbuhan.

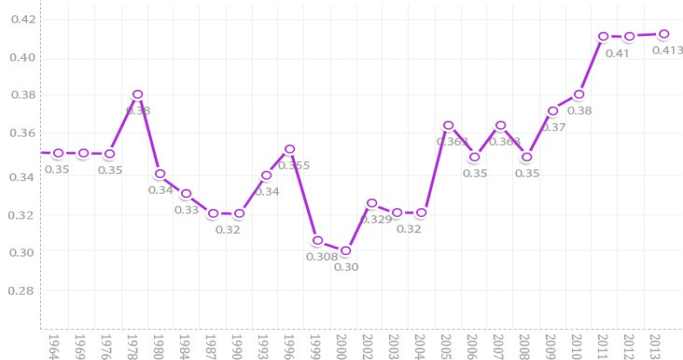
Ketimpangan Semakin Memburuk Dalam Sejarah Indonesia

Lebih lanjut Faisal Basri menegaskan bahwa data ketimpangan pendapatan yang kian melebar bisa menjelaskan fenomena perekonomian Indonesia pasca reformasi dan krisis tahun 1998. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi bisa menurunkan jumlah orang miskin, yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan rata-rata rakyat Indonesia. Namun, lapisan kelas atas tumbuh jauh lebih cepat ketimbang kelas pendapatan bawah yang tumbuh sangat lambat, sehingga menghasilkan jurang yang cukup dalam antara kelas atas dengan kelas bawah, atau antara si kaya dengan si miskin yang semakin melebar. Salah satu koefisien yang menginformasikan kecenderungan itu sama seperti yang telah disebutkan oleh Deputi Rektor Universitas Paramadina di atas terkait Indeks Gini di mana selama enam tahun terakhir mengalami peningkatan dan sejak tahun 2011 menembus angka 0,4.

Tahun 2013 Indeks Gini mengalami peningkatan kembali walaupun tipis menjadi 0,413. Hal tersebut terlihat pada Grafik 3 di bawah berikut. Pada tahun 1964, ketimpangan memang terjadi namun dalam Indeks Gini yang relatif moderat yaitu 0,35. Demikian pula halnya pada tahun 2000 setelah terjadi reformasi bahkan sempat mengecil menjadi 0,3.

Namun, setelah tahun 2004 hingga sekarang Indeks Gini terus mengalami tren peningkatan, hal ini berarti terjadi ketimpangan pendapatan yang semakin melebar di antara masyarakat.

Grafik 3
Indeks Gini Indonesia



Sumber: BPS

Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan tersebut, menurut Wijayanto pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk mendorong kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan tersebut diwujudkan dengan meratakan kemakmuran bukan meratakan kemiskinan. Disadari atau tidak, pemerintah kadang-kadang mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada kelompok masyarakat yang sudah berpenghasilan menengah hingga atas. Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2014 masih jauh dari upaya mengatasi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Saat belanja modal dan infrastruktur diperlambat dalam APBN 2014, belanja pegawai dan remunerasi justru diangkat. Belanja barang diturunkan 2,23 persen menjadi Rp. 201,89 triliun. Namun, di sisi lain belanja modal hanya naik 6,9 persen menjadi Rp. 205,84 triliun, termasuk belanja infrastruktur di dalamnya yang sekadar meningkat 2,4 persen menjadi Rp. 188,7 triliun. Padahal berbagai literatur ekonomi menunjukkan, belanja modal, termasuk belanja infrastruktur merupakan jenis belanja pemerintah yang paling memberikan efek berganda (multiplier effect) ke berbagai sektor ekonomi. Efek kontras kebijakan belanja itu terlihat karena pada saat yang sama, belanja pegawai atau belanja pegawai negeri sipil, melesat 13,3 persen menjadi Rp. 263,98 triliun.

Dalam Diskusi Koalisi Masyarakat Sipil untuk APBN Kesejahteraan, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menyampaikan agar fokus perhatian pemerintah ke depan dalam penyusunan APBN sebagai landasan untuk mendorong perumusan kebijakan APBN yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Desain anggaran sekarang belum ditujukan untuk mendorong kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat serta

menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Menurut Fitra, APBN sekarang kurang berperan optimal untuk mendorong perekonomian nasional. Tingginya pertumbuhan ekonomi tidak ada artinya jika sebagian besar masyarakat tidak memperoleh kesejahteraan.

Sejalan dengan uraian di atas, maka penulis berpendapat bahwa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi ketimpangan selama ini, pemerintah harus memulai dengan melakukan revisi dan perbaikan terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Sebagai otoritas fiskal, pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan kebijakan mengenai pendapatan dan belanja negara. Apalagi pada tahun 2014 dilakukan pemilihan umum sehingga pemerintahan yang baru memiliki kebebasan untuk menetapkan kebijakan fiskal tanpa intervensi dari manapun. Dengan demikian, pemerintahan yang baru nanti lebih memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan daripada hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa adanya unsur keadilan dan pemerataan.

Masyarakat sudah menunggu terlalu lama untuk merasakan keadilan dan pemerataan hasil proses pembangunan. Langkah pertama yang dapat pemerintah baru nanti lakukan adalah restrukturisasi belanja negara dalam APBN tahun berikutnya. Selama ini, dalam APBN 2014 maupun tahun sebelumnya dari sisi belanja kurang memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan tersebut, terlihat dari proporsi belanja APBN tahun 2014, sebagian besar habis untuk belanja pegawai sebesar Rp276 triliun dan membayar subsidi Rp336 triliun yang notabene masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin tidak menikmati belanja tersebut. Masyarakat membutuhkan rumah sederhana, fasilitas pendidikan yang terjangkau dan berkualitas, jaminan kesehatan bagi setiap warga, akses jalan yang menghubungkan antardaerah, dan proyek infrastruktur yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penutup

Walaupun pemerintah mengklaim perkembangan ekonomi banyak mengalami kemajuan namun perekonomian Indonesia tidak terlepas dari berbagai ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat. Bahkan data terakhir berdasarkan Indeks Gini, yang mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat menunjukkan fenomena yang cukup mengawatirkan. Indeks Gini menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2004 hingga tahun 2013, bahkan tahun 2013 Indeks Gini sebesar 0,413. Hal ini menunjukkan terjadi ketimpangan pendapatan yang semakin

melebar di dalam masyarakat. Fenomena inilah yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia, kesenjangan antara kelas atas dengan kelas bawah atau antara si kaya dengan si miskin. Untuk itulah diperlukan langkah cepat oleh Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan perubahan reorientasi dan meluruskan tujuan utama pembangunan nasional.

Terlebih pada tahun 2014 merupakan tahun politik, di mana Indonesia melakukan pemilihan umum untuk menentukan arah dan kebijakan bangsa Indonesia dalam dekade mendatang. Pemerintah mendatang harus menempatkan dan mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan dan meluruskan esensi dari pembangunan itu sendiri. Anggaran Pendapatan dan Belanja pun harus diarahkan dan didorong kepada tujuan untuk memberikan dorongan bagi kemajuan bangsa dan mensejahterakan rakyat, bukannya terjebak kepada belanja rutinitas dan belanja subsidi energi yang semakin mengerikan. Sehingga tahun 2014 dapat dimanfaatkan untuk memilih calon legislatif dan pemerintah baru yang berorientasi pada Indonesia baru yang memiliki visi dan misi menjalankan amanat untuk mencapai tujuan bernegara sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, kita dapat membangun perekonomian yang tangguh untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur sekaligus menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan disegani secara internasional.

Rujukan

1. "Indonesia Hadapi Ketimpangan Ekonomi Terburuk Dalam Sejarah", Antara News.com, 10 Januari 2014, <http://www.antarabengkulu.com/berita/21359/indonesia-hadapi-ketimpangan-ekonomi-terburuk-dalam-sejarah>, diakses 20 Januari 2014.
2. "Segera Atasi Ketimpangan Ekonomi", Koran Jakarta, 11 Januari 2014, <http://koranjakarta.com/?3101-segera%20atasi%20ketimpangan%20ekonomi>, diakses 21 Januari 2014.
3. "Ketimpangan Kian Memburuk", Kompasiana, 16 Januari 2014. <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/01/16/ketimpangan-kian-memburuk-628132.html>, diakses 20 Januari 2014.
4. "Lima Fokus Perhatian APBN 2014", Seknasfitra.org, <http://seknasfitra.org/lima-fokus-perhatian-apbn-2014/>, diakses 21 Januari 2014.
5. "Memanfaatkan Demokrasi Untuk Kesejahteraan", Suplemen Bisnis Indonesia, 16 Desember 2013.
6. "Rugi Rp 5 Triliun, Pertamina Naikkan Harga LPG", (<http://www.tempo.co/read/news/2012/09/25/090431751/Rugi-Rp-5-Triliun-Pertamina-Naikkan-Harga-LPG>, diakses 7 Januari 2014).